

Abdul Gani Jamora Nasution | Safran



—Memaknai Ulang—
MATERI PKN
di Tingkat MI/SD

Kata Pengantar:

Dr. Nirwana Anas, M.Pd.

Kaprodi PGMI UIN Sumatera Utara Medan



—Memaknai Ulang—

MATERI PKN

di Tingkat MI/SD

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

—Memaknai Ulang—

MATERI PKN

di Tingkat MI/SD

ABDUL GANI JAMORA NASUTION

&

SAFRAN



Memaknai Ulang Materi PKn di Tingkat MI/SD

Penulis : Abdul Gani Jamora Nasution dan Safran
Editor : Irfawaldi dan Amrullah Siagian
Desain Sampul : Dany Firdaus
Layout Isi : RGB Desain

Cetakan I, September 2025

Diterbitkan oleh:

Magnum Pustaka Utama

Jl. Parangtritis KM 4 RT 03 No.83 D Salakan, Bangunharjo,
Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp.0878-3981-4456, 0821-3540-1919

Email: penerbit.magnum@gmail.com

Homepage: www.penerbitmagnum.com

ISBN: 978-634-7034-18-2



KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, itulah ungkapan yang patut yang diutarakan lebih awal atas selesainya naskah ini. Disadari bahwa tulisan ini merupakan bagian dari momen perkuliahan selama satu semester pada matakuliah PKN di MI/SD di semester III (tiga) 2025/2026. Shalawat serta salam, tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan contoh dan suri tauladan untuk seluruh alam semesta. Paket kesalihan individu dan kesalihan sosil telah menyatu dalam setiap aktivitasnya. Hingga citra nabi Muhammad bukan hanya ditelaah dan dicontoh bagi kalangan yang beragama Islam saja. Melainkan dengan berbagai latar belakang keyakinan dan keagamaan dijadikan sebagai *role model* kehidupan.

Telah disebutkan pada pragraf awal, bahwa tulisan ini merupakan bagian dari aktivitas perkuliahan selama kebersamaan mahasiswa PGMI. Hingga berbagai *notes* dan referensi yang digunakan penulis dirampungkan sesuai kebutuhan dan menjadi sebuah rangkaian bahan bacaan untuk mengenal atau memahami tentang materi dan Pembelajaran tentang PKN di tingkat MI/SD. Atas kesadaran inilah kemudian, sayang sekali dirasakan manakala tidak dikemas secara apik untuk dijadikan sebagai bahan diskusi, wacana, dan perdebatan terhadap materi PKN tersebut.

Terlebih pada tingkat MI/SD, materi yang disuguhkan fokus pada pembahasan empat pilar kebangsaan, pertama pancasila. Kedua, UUD 1945. Ketiga, Bhineka Tunggal Ika dan keempat NKRI. Manakala lebih jauh dikritik,

maka pembasahan empat pilar kebangsaan seperti yang disebutkan tersebut posisi sejarah menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Karena, sejatinya tentang negara Indonesia memiliki kekhasan rangkaian perjalanan segenap lapisan bangsa dari sabang sampai merauke. Dibuktikan dengan kehadirannya bangsa Asing yang diawali dari misi perdagangan sebut saja dari kalangan bangsa Arab dan seterusnya. Hingga muncul pada abad XVI kedatangan bangsa asing seperti Portugis disusul Belanda. Hingga bangsa Indonesia dijajah. Padahal, awalnya semangat perdangan karena melimpah ruahnya rempah-rempah yang dicari oleh masyarakat dunia kala itu, berubah menjadi kolonialisasi. Fakta yang dihadapi oleh masyarakat kala itu (masih nusantara) tentu memiliki keterkaitan erat dengan wajah bangsa Indonesia dalam melepaskan belenggu penjajahan. Titik terang pada awal abad XX dengan lahirnya gerakan Budi Utomo menjadi awal pergerakan nasional. Memahami komprehensif inilah yang saya sebut sebagai *Indonesian totality of history*.

Para aktor dan keberanian bangsa Indonesia untuk satu tekad memerdekakan Indonesia nyata pada tanggal 17 Agustus 1945, yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Dengan rentetan agenda awalnya ada BPUKI (Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) yang kemudian berubah menjadi PPKI (Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia). Semangat untuk membentuk sebuah negara, para pendahulu bangsa melahirkan berbagai konsep yang menjadi nafas bersama, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. Posisi Pancasila dengan segala kekhasan fakat dan terlahir dari masyarakat, UUD 1945 dengan Pembukaan dan Batang tubuhnya, Bhineka tunggal Ika dengan fakta kemultikulturan masyarakat, baik secara keyakinan maupun secara kebudayaan masing-masing, hingga persoalan konsepsi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan harga mati, yang harus dijaga, dirawat, dan kembangkan untuk kemakmuran seluruh raykat Indonesia.

Namun, persoalan yang semakin menyedihkan adalah dengan kekhasan konseptual dan semangat api sejarah yang pernah dikobarkan para pendahulu bangsa kita, tampaknya manakala melihat fakta ditemukan pesimis terhadap masa depan bangsa ini. Berbagai praktik yang dapat dikatakan menyakiti para perumus bangsa, dengan tindakan kekinian seperti banyaknya yang korupsi dilembaga pemerintahan, masyarakat semakin acuh tak acuh terhadap kondisi kerabat dan tetangganya, tawuran antar sekolah, dan banyak kasus lainnya. Hingga harus dikatakan, pada generasi kita, “kita harus mampu menjadi pembawa obor kegelapan” atas fakta yang disebutkan. Kita harus cepat memberikan tindakan, baik secara edukasi peningkatan pemahaman tentang Indonesia yang di dalamnya muatan empat pilar kebangsaan yang bersifat kontekstual.

Narasi inilah kemudian, pentingnya dalam wacana PKN dikemas dalam sebuah pembelajaran yang diharuskan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap berbangsa dan bernegara. Ciptakan optimisme generasi terlebih pada tingkat MI/SD yang merupakan pendidikan formal pada fase peralihan usia keemasan (*golden age*). Maka, seorang guru juga para calon guru seharusnya dibekali dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan, agar wacana tentang PKN dipastikan dialami, dipahami, dihayati, dan dipraktik oleh anak-anak.

Paling tidak penjelasan yang penulis ungkapkan di atas, dapat menghantarkan sebuah pemahaman terhadap apa yang diinginkan dari tujuan buku ini. Tentu sebagai penulis harus berterimakasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang memberikan pemikiran dari berbagai sudut pandang, hingga sebagai dosen harus mampu memahami lebih jauh. Salah satunya adalah dengan kelahiran buku ini. Tanpa ragu, sebagai dosen yang terus mengampu matakuliah PKN di MI/SD, memberikan inspirasi terhadap lahirnya karya kecil ini. Karena, arus informasi dan cara berpikir termasuk tantangan yang dihadapkan selama pembelajaran dari mahasiswa, menemukan keunikan tersendiri pada penulis, yang kemudian diarahkan pada sebuah karya. Juga ucapan terimakasih buat senior satu almamater ketika *nyantri* di Musthafawiyah Purba Baru, yang saya panggil dengan sebutan Buya, bernama Irfawaldi. Atas kerendahan hatinya untuk terus mendengarkan celotehan penulis, mulai dari cerita bahagia dan susah. Akan tetapi, manakala diprosentasikan tentu lebih banyak yang susah. Seperti “kreta tidak ada bensin” dan lain sebagainya, yang tidak dapat diungkapkan di sini. Sekali lagi terimakasih bang Buya, atas kerendahan hati dan waktunya, hingga bersedia sebagai editor buku ini. Juga buat adinda Amrullah yang memberikan catatan kritis manakala penulis memintak untuk membaca naskah buku ini, dengan keuletan dan diskusi yang menarik hingga memberikan pelajaran berharga bagi penulis, sampai titik kulminasi bahwa kesempurnaan hanyalah milik sang maha ilmu. Dengan pengertian, penulis tentu membutuhkan berbagai referensi dan bahan pendekatan keilmuan yang lebih banyak (*multi approach*). Inilah menjadi bagian untuk kerja akademik pada momen berikutnya. Spesial terimakasih kepada ibu Nirwana Anas, selaku ketua Prodi PGMI yang secara pribadi memberikan kontribusi besar, terhadap dinamika keilmuan untuk keunggulan di PGMI. Terlebih dalam kesempatan ini, ibu menyempatkan memberikan catatan khusus sebagai kata pengantar. Kata pengantar yang bukan sebatas apresiasi. Melainkan menembus ruang isu dan wacana terhadap komitmen keilmuan lebih spesifik pada persoalan PKN MI/SD di Indonesia. Substansi kajian yang dilontarkan menjadi bagian nilai lebih (*core values*) pada karya ini. Oleh karenanya, sekali sebagai

penulis haturkan terimakasih. Tentu ucapan terimakasih penulis layangkan kepada semua pihak yang turut membantu kehadiran buku ini sekalipun nama-nama mereka tidak disebut. Penulis meyakini ada saja “doa-doa dan harapan mereka yang terus mengitari langit, agar diijabah oleh sang Maha kuasa Ilmu untuk penulis demi banyak karya yang dilahirkan”. Terakhir, sadar karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis haturkan terimakasih manakala ada kritik konstruktif untuk perbaikan pada momen berikutnya.

Medan Amplas, Juli 2025

Penulis

Abdul Gani Jamora Nasution & Safran



KATA PENGANTAR

Catatan Refleksi: Isu dan Wacana PKn di Sekolah Dasar di Indonesia

Oleh Dr. Nirwana Anas, M.Pd

(Ketua Prodi PGMI FITK UIN Sumatera Utara
Medan)

Syukur alhamdulillah ucapan yang dapat saya sampaikan atas kehadiran buku dari adinda Abdul Gani Jamora Nasution dan Safran. Terlebih manakala dimintakkan untuk menghantarkan karya yang berjudul “membaca ulang materi PKN di MI/SD”. Selanjutnya, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. sosok tauladan yang memberikan kepada kita contoh berpikir dan berperilaku yang bersandarkan pada semangat keilahian. Dari nabi Muhammad kita diajarkan bagaimana untuk menggunakan akal dan harus bermanfaat kepada banyak orang, dengan alasan normatif Islam kerap menyandarkan pada ungkapan “*khairun nas anfa’uhum linnas*”

Sebagai pimpinan di program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) memberikan catatan terhadap *road map* dan pencapaian yang diraih. Catatan Pertama, bahwa PGMI pada tahun 2025 ini telah dapat mempertahankan akreditasi Unggul. Catatan Kedua, sadar terhadap pembelajaran PGMI yang memiliki visi misi, dan tujuan. Oleh karena itu, kesempatan ini perlu diungkapkan.

Pertama, visi “Unggul dan tercapainya dalam menyiapkan guru kelas profesional dan berakhlak mulia dalam bidang MI/SD berbasis wahdatul ulum transdisipliner untuk mewujudkan masyarakat pembelajar yang mandiri di tingkat Asia Tenggara tahun 2030. Tentu visi ini dapat dinyatakan dalam praktiknya melalui misi.

Kedua, Misi:

1. Melaksanakana pendidikan pembelajaran dalam bidang pendidikan dasar berbasis wahdatul ulum transdisipliner
2. Melaksanakan penelitian dalam pengembangan teknologi pendidikan dasar berbasis wahdatul ulum transdisipliner
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam, bidang pendidikan dasar berbasis wahdatul ulum transdisipliner
4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak pada tingkat nasional dan global dalam bidang pendidikan dasar berbasis wahdatul ulum transdisipliner

Ketiga, tujuan

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang berakhlak mulia dan profesional dalam melaksanakan berbasis wahdatul ulum transdisipliner.
2. Menghasilkan sarjana pendidikan yang mampu melaksanakan penelitian bidang pendidikan dasar berbasis wahdatul ulum transdisipliner.
3. Menghasilkan sarjana pendidikan yang mampu berkontribusi kepada masyarakat dengan meemanfaatkan teknologi tepat guna berbasis wahdatul ulum transdisipliner.
4. Menghasilkan sarjana pendidikan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan dasar berbasis wahdatul ulum transdisipliner.

Catatan Ketiga, Refleksi kritis Isu dan Wacana PKn di Sekolah Dasar di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran strategis di tingkat pendidikan dasar di Indonesia, baik di lembaga Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Karena memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter, identitas nasional, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. PKn tidak sekedar mengajarkan teori tentang konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pembentukan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah membentuk catatan kritis yang kemudian divisualisasikan melalui beberapa nilai spirit. Pertama, PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Karakter. Di tingkat MI/SD, PKn sering diposisikan sebagai sarana penanaman nilai Pancasila, nasionalisme, serta tanggung jawab sosial. Namun dalam praktiknya, proses pembelajaran PKn

¹ Somantri, N. C. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

sering kali masih menekankan aspek kognitif, yakni hafalan terhadap norma dan peraturan, daripada penginternalisasian nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari.² Hal ini menimbulkan refleksi penting bahwa orientasi PKn di tingkat dasar perlu direorientasi menjadi pendidikan karakter berbasis tindakan (*action-oriented citizenship*).³Kedua, Pergeseran Paradigma: Dari *Civic Knowledge* ke *Civic Disposition*. Isu utama yang muncul dalam wacana PKn dewasa ini adalah perlunya pergeseran dari *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) menuju *civic disposition* (sikap kewarganegaraan).⁴Di tingkat dasar, anak-anak tidak cukup hanya mengetahui arti Pancasila atau UUD 1945, tetapi juga harus dibiasakan untuk mempraktikkan nilai-nilai itu melalui kegiatan partisipatif seperti diskusi kelas, pemilihan ketua kelas, dan kerja kelompok.⁵ Ketiga, Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi. Era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan baru bagi pelaksanaan PKn di sekolah dasar. Anak-anak sejak dini terpapar berbagai wacana global yang kadang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.⁶Dalam konteks ini, guru PKn perlu berperan sebagai fasilitator literasi digital kewarganegaraan (*digital citizenship literacy*) agar siswa mampu berpikir kritis, bijak dalam bermedia sosial, dan berpartisipasi positif dalam dunia digital.⁷Keempat, Problematika Kurikulum dan Implementasi. Kurikulum Merdeka yang diterapkan sejak 2022 membawa perubahan signifikan terhadap struktur mata pelajaran PKn yang kini terintegrasi dalam *Profil Pelajar Pancasila*.⁸Namun demikian, di lapangan, banyak guru yang masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kompetensi profil tersebut ke dalam aktivitas pembelajaran konkret.⁹Refleksi kritis ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kurikulum dan kapasitas implementatif guru. Kelima, Peran Guru sebagai Teladan Moral. Guru PKn di MI/SD bukan hanya pengajar konsep, tetapi juga figur teladan nilai moral. Anak-anak belajar melalui contoh konkret dari perilaku guru dalam keseharian, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan keadilan.¹⁰Maka, penguatan profesionalisme dan integritas guru PKn menjadi

² Winataputra, U. S. *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi dan Reformasi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2013.

³ Branson, M. S. *The Role of Civic Education*. Washington D.C.: Center for Civic Education, 1998

⁴ Baca karya Kerr, D. "Citizenship Education: An International Comparison." *International Journal of Educational Research*, 1999

⁵ Hoskins, B. & Mascherini, M. "Measuring Active Citizenship Through the Development of a Composite Indicator." *Social Indicators Research*, 2009

⁶ Wahyudi, A. "Tantangan Globalisasi terhadap Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 9 No. 2, 2019.

⁷ Ismiyati, R. "Literasi Digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar." *Jurnal Civics*, Vol. 18 No. 1, 2021.

⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Kurikulum Merdeka: Panduan Pelaksanaan Sekolah Dasar*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022

⁹ Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar*. Bandung: Rosda, 2023

¹⁰ Lickona, T. *Education for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991

isu penting dalam menjaga relevansi pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar.¹¹Keenam, Wacana Multikulturalisme dan Inklusivitas. Salah satu wacana penting yang mengemuka dalam PKN adalah pendidikan multicultural.¹²Indonesia sebagai negara majemuk menuntut PKN di sekolah dasar untuk membangun kesadaran keberagaman dan toleransi sejak dini. Pembelajaran PKN seharusnya mencerminkan semangat inklusivitas, bukan hanya menekankan keseragaman nilai.¹³Ketujuh, Isu Sekularisasi dan Politisasi Pendidikan. Di beberapa kasus, PKN menjadi ruang tarik-menarik antara kepentingan politik dan ideologis.¹⁴Hal ini menimbulkan pertanyaan reflektif: sejauh mana PKN di MI/SD benar-benar menjadi instrumen pendidikan demokratis, bukan alat indoktrinasi kekuasaan? Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menumbuhkan daya kritis, bukan ketaatan buta terhadap otoritas.¹⁵Kedelapan, Pembelajaran Kontekstual dan Partisipatif. Pendekatan pembelajaran kontekstual menjadi salah satu strategi yang efektif dalam pembelajaran PKN di MI/SD.¹⁶Melalui metode partisipatif seperti *role playing*, debat mini, dan studi kasus lokal, siswa dapat memahami nilai kewarganegaraan dalam konteks kehidupan nyata.¹⁷ Refleksi terhadap isu dan wacana PKN di MI/SD menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu terus dikembangkan agar sejalan dengan tuntutan zaman. Pendidikan ini harus bersifat dinamis, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan konteks global, serta mengembangkan warga negara muda yang cerdas, berkarakter, dan aktif dalam kehidupan demokratis.¹⁸

Narasi catatan kritis yang diungkapkan di atas, menjadi modal sebuah sudut pandang terhadap karya yang dilahirkan oleh adinda AGJ (sebutan akrab yang muncul di prodi) dan Safran. Karena disadari bahwa adinda mengekspresikan terhadap materi PKN untuk tingkat MI/SD sarat muatan factual yang dimiliki oleh Indonesia, bahkan masih pada masa-masa yang dikenal sebagai Nusantara. Dimulai dari kekhasan dari berbagai daerah yang ditampilkan secara budaya, kepercayaan dan seterusnya. Oleh masyarakat kita telah memiliki keunikan tersendiri. Yang kemudian nyatalah diafirmasi melalui pilar-pilar kebangsaan

¹¹ Darmadi, H. "Profesionalisme Guru PKN di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 6 No. 3, 2018.

¹² Banks, J. A. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. New York: Wiley, 2009.

¹³ Tilaar, H. A. R. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.

¹⁴ Budimansyah, D. "Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Civicus*, Vol. 10 No. 1, 2012.

¹⁵ Giroux, H. A. *Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning*. Westport: Bergin & Garvey, 1988.

¹⁶ Johnson, D. W., & Johnson, R. T. *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Boston: Allyn & Bacon, 1999.

¹⁷ Susanto, A. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana, 2016.

¹⁸ Budimansyah, D. & Suryadi, K. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Alfabeta, 2008.

yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Rumusan ini, harus dipahami yang oleh penulis menyebutnya sebagai *Indonesian Totality of History*. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama baca, telaah, dan diskusikan secara kritis agar iklim akademik berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi seluruh alam semesta.

Medan, Agustus 2025

DR. Nirwana Anas, M.Pd

(Ketua Prodi PGMI UIN SU Medan)



KATA PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Memaknai Ulang Materi PKn di Tingkat MI/SD karya Bapak Abdul Gani Jamora, M.Pd. dapat hadir di tengah para pendidik, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan. Sebagai editor, saya merasa bangga dapat mendampingi proses penyusunan dan penyempurnaan naskah yang penting ini, karena buku ini menghadirkan wacana baru yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan kewarganegaraan khususnya di tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Dalam buku ini, penulis mengajak kita melihat kembali materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dari perspektif yang eksentrik dan eksklusif. Dengan menggabungkan kajian ilmiah, telaah kurikulum, dan pengalaman praktis di lapangan, penulis menyajikan analisis yang mudah dipahami sekaligus kaya dengan argumentasi akademik. Ulasan yang ditawarkan tidak sekedar menampilkan diskursus teoritik, tetapi juga menghadirkan proses strategi pengaplikasian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri secara historikal sekaligus kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

Gaya penulisan yang komunikatif membuat buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi, tetapi juga bermanfaat bagi guru, mahasiswa calon pendidik, pengembang kurikulum, maupun siapa saja yang tertarik pada penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kehadiran buku ini diharapkan mampu memperluas wawasan, memantik refleksi kritis, sekaligus menginspirasi praktik pembelajaran PKn yang lebih kreatif dan bermakna.

Sebagai editor, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis atas dedikasi dan ketekunannya dalam meramu gagasan serta data menjadi sebuah karya yang utuh dan bernas. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini. Semoga buku *Memaknai Ulang Materi PKn di Tingkat MI/SD* ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan mutu pembelajaran kewarganegaraan dan membentuk generasi muda Indonesia yang tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter dan berintegritas.

Editor,

(Amrullah Siagian, MPd)



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	v
Kata Pengantar: <i>Dr. Nirwana Anas, M.Pd (Ketua Prodi PGMI FITK UIN Sumatera Utara Medan)</i>	ix
Kata Pengantar Editor	xv
Daftar Isi	xvii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Sistematika Penulisan	7
Bab 2 Memaknai Ulang Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	13
A. Melimpah Ruah Sumber Daya Alam: Alasan Hilir Mudik ke Indonesia	14
B. Monopoli bangsa Asing dan Perlawanan Masyarakat	28
C. Gerakan Perjuangan Kemerdekaan	30
D. Refleksi	32
Bab 3 Pancasila Abadi	37
A. Tokoh Bangsa Merumuskan Pancasila: Telaah Pemikiran Soekarno	38
B. Nilai-nilai Pancasila untuk Kehidupan Berbangsa	57
C. Penerapan Nilai Pancasila dalam kehidupan	59
D. Refleksi	62

Bab 4 Taat Pada Konstitusi.....	67
A. Sejarah Singkat Konstitusi.....	67
B. Pengertian Konstitusi.....	68
C. Sejarah Konstitusi di Indonesia	70
D. Periode Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945	71
E. Memaknai Pembukaan UUD 1945	76
F. Refleksi	82
Bab 5 Romantisnya Bhineka Tunggal Ika.....	85
A. Makna Bhineka Tunggal Ika	85
B. Keragaman Bangsa Indonesia.....	88
C. Refleksi	95
Bab 6 NKRI, Harga Mati!	99
A. Mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	99
B. Implementasi Nilai-Nilai NKRI Harga Mati.....	115
C. Refleksi	123
Bab 7 Pembelajaran Pkn/SD: Sebuah Konsep.....	129
A. Paradigma PKn di MI/SD	129
B. Sejarah Perjalanan Materi PKn di MI/SD	133
C. Pentingnya PKn untuk Siswa MI/SD.....	138
D. Karakteristik Konsep diri Anak MI/SD dalam Mata Pelajaran PKn	140
E. Karakteristik Anak Usia MI/SD dalam Mata Pelajaran PKn	141
F. Karakteristik Pembelajaran Inovatif, Kreatif dan Bermakna.....	142
G. Strategi Manajemen Kelas PKn MI/SD.....	148
H. Strategi Belajar PKN Agar Tidak Membosankan	151
I. Merancang Media Pembelajaran PKn	153
Tentang Penulis	155

A. Latar Belakang

Kajian tentang Pancasila menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah universitas, yang dalam kerangka kurikulum menjadi salah satu matakuliah wajib universitas. Pemahaman lanjutannya adalah bahwa matakuliah Pancasila, apapun fakultas dan jurusanannya maka wajib diberikan dan dipelajari oleh mahasiswa yang berada dijenjang sarjana dan diploma.¹ Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia² dengan muatan khazanah terhadap fakta keunikan dan kekhasan semua lapisan bangsa. Belajar dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dengan kemultikulturan dari sabang sampai Merauke, yang kemudian terkoneksi menjadi sebuah kesatuan yang besar bernama Negara Republik Indonesia (NKRI).

Para tokoh awal bangsa seperti Soekarno, M. Yamin, dan seterusnya³ dalam rumusan yang dikenal BPUPKI (Badan Persiapan Upacara Kemerdekaan Indonesia) duduk secara serius merumuskan landasan berbangsa dan bernegara. Tentu tidak semudah dibayangkan dalam meremuskannya seperti ala *magician* dengan ungkapan populernya *simsalabim* atau *abracadabra*⁴ dalam mewujudkan

¹ Lebih jelasnya baca UU nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi tahun 2012. Dalam UU tersebut disebutkan pada pasal 35 ayat 3 ada empat matakuliah yang wajib diberikan yakni Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Pada ayat 5 dikuatkan untuk dilaksanakan pada program sarjana dan diploma.

² Baca karya Muh. Wasith Achadi, *Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Suka, 2020).

³ Nana Setialaksana, "Peranan badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945 Dalamn Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia", Jurnal Artefak, Vol. 4. No. 2 hlm. 109-1017 <https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/view/904/798>

⁴ Istilah *simsalabim* atau *abracadabra* merupakan ungkapan yang biasa digunakan oleh *magician* dalam pertunjukkan dalam suasana keheningan seperti ala penyihir membuat takjub dalam seketika pertunjukkan tersebut. Baca selanjutnya karya Craig Conley, *Magic Word: A Dictionary*, (USA: Red Wheel/Weiser, 2008), hlm. 43-44.

dan menorehkan menjadi sebuah tinta perjalanan bangsa. Akan tetapi penuh dinamika yang tampil dipermukaan. Sekalipun segenap bangsa bersemangat untuk memerdekakan dari cengkraman penjajahan, akan tetapi kobar api tetap menyala untuk satu tekad merdeka.

Maka paling tidak dapat digambarkan dinamika yang terjadi kala itu ada dua dinamika. Pertama, dinamika internal tokoh bangsa Indonesia itu sendiri.⁵Dinamika dari internal ini dipahami sebagai gejala yang timbul akan variasi pemikiran dan gejala politik yang sedang terjadi saat itu untuk memproklamirkan kemerdekaan. Kedua, dinamika kondisi eksternal yang sedang dalam masa penjajahan oleh Jepang. Pada poin kedua ini, terlihat jelas bagaimana BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang kemudian berganti namanya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan usulan Jepang.⁶Hingga dengan skema kontribusi Jepang terhadap persiapan kemerdekaan ini, dapat disalah pahami sebagai pemberian hadiah Jepang kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk merdeka. Tentu ini salah kaprah dan tidak membaca totalitas sejarah perjuangan para tokoh-tokoh kita.

Historis perjuangan yang tampil dipermukaan di berbagai daerah Indonesia yang bukan sebatas memaknai Jawa sentris sebagai perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Tentu sangat tidak adil rasanya bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya membicarakan tentang pergerakan yang berada di pulau jawa. Bahkan para guru yang tampil di depan peserta didik, tidak menyadari atau bahkan apatis terhadap perjuangan yang ada di daerah masing-masing dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Bergerak dari pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan segala rumusan dan muatan yang dapat diketahui hingga kemudian Indonesia dapat melepaskan dari belenggu penjajahan, tepatnya pada hari jum'at legi yakni tanggal 17 Agustus 1945 berketepatan pada bulan Ramadhan. Hingga pada hari berikutnya, Indonesia menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷Dengan pemahaman, pada tanggal 17 Agustus merupakan momentum proklamasi yang dimaknai sebagai pelepasan diri dari cengkraman penjajahan, yang kala

⁵ Kejadian Rengasdengklok menjadi salah satu momentum dinamika internal sesama tokoh bangsa. Penculikan Soekarno dan M. Hatta, yang kemudian “dipaksakan” untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

⁶ Dadan Wildan, “Membuka Catatan Sejarah: Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 1945”, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019. https://www.setneg.go.id/baca/index/membuka_catatan_sejarah_detik_detik_proklamasi_17_agustus_1945

⁷ Catatan terhadap detik-detik kemerdekaan dalam tulisan Dadan Wildan, terlihat sangat a lot terhadap proklamasi kemerdekaan. Hingga alasan untuk memproklamirkan kemerdekaan diperdapat ada alasan religiusitas yang dipahami oleh Soekarno. Baca selanjutnya Dadan Wildan, “Membuka Catatan Sejarah: Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 1945”, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019. https://www.setneg.go.id/baca/index/membuka_catatan_sejarah_detik_detik_proklamasi_17_agustus_1945

itu Negara Tirai Bambu alias Jepang. Sedangkan tanggal 18 Agustus sebagai wujud menjadikan sebagai Negara. Sekalipun setelah merdeka dan NKRI sudah dibentuk, ternyata Belanda masuk lagi ke Indonesia pada tahun 1948. Hingga menjadikan Yogyakarta menjadi pusat Ibu Kota pindah dari Jakarta.

Rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini tentu kita didasarkan pada konsensus historis bangsa-bangsa asing yang begitu banyak datang. Kedatangan mereka seperti bangsa Portugis yang diketahui lebih awal dengan segala persiapan khusus untuk komoditi rempah-rempah nusantara, yang paling dicari oleh dunia internasional kala itu. Seperti misalnya lada, cengkeh dan seterusnya yang sudah dimanfaatkan ratusan dan bahkan ribuan tahun oleh masyarakat eropa dan timur tengah. Tentu Portugis tidaklah semua wilayah nusantara mereka datangi, dari peta perjalanan mereka hanya fokus pada kepulauan Ternate, Maluku, dan pulau Jawa.

Berhasilnya bangsa Portugis memberikan kabar gembira bagi bangsa lain yang terus berdatangan seperti Belanda, Inggris, dan Jepang dengan skema awal untuk rempah-rempah yang kemudian berubah menjadi penjajahan (kolonialisasi). Ada dua konsepsi yang terus diperdengarkan sejarah Indonesia masa tradisonal (masa Nusantara). Pertama, dengan jalur rempah-rempah seperti yang disebutkan jenis kekayaan nabati yang melimpah ruah di Nusantara. Kedua, jalur sutera. Jalur sutera ini tentu bukanlah menjadi andalan pencarian di Nusantara, melainkan bagian dari transaksi dari bangsa asing. Itu ditemukan dari bangsa Asia Timur seperti bangsa China. Oleh karenanya, jalur yang tepat berdatangan ke Nusantara adalah untuk jalur rempah.

Setelah mengetahui perjalanan perjuangan bangsa tinjauan sejarah, kerangka dianggap mendesak dalam pemahaman materi PKN di tingkat dasar adalah persoalan Pancasila. Posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa yang dilahirkan dari hasil pemikiran tokoh kala itu sebut saja Soekarno beserta tim, merupakan hasil rumusan faktual yang dilahirkan dari Rahim ibu pertiwi. Oleh karenanya, dengan muatan lima sila seperti yang dihafalkan di bangku sekolah dasar, memiliki muatan nilai-nilai yang terintegrasi antara satu sila dengan sila berikutnya, tanpa dipisah-pisahkan. Dimulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sebagai kata awalnya tidak diperbolehkan dipisah-pisah atau dimaknai secara parsial. Maka bagi seluruh lapisan bangsa, baik yang berada di lembaga pemerintahan harus tunduk, patuh, dan berkhidmah dalam beraktivitas sesuai nilai-nilai Pancasila. Begitu juga masyarakat, apapun jenis pekerjaannya dan latarbelakang aktibitasnya sepanjang dia merupakan warga Indonesia harus menjalankan secara totalitas Pancasila. Oleh karenanya, etos

kerja yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu, Pancasila harus menjadi bagian nadi kehidupannya. Hingga tidak ada satupun yang diperbolehkan mengatakan atau mengklaim dirinya atau kelompoknya “saya Pancasila, Kami Pancasila” dan seterusnya.

Fakta dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di tahun 2018 dan 2019 diperdapati sebuah gerakan yang mengatasnamakan Pancasila. Akan tetapi, seperti narasi pragraf di atas telah dapat dibantah dengan dalil, bahwa ungkapan Pancasila bukan diperuntukkan untuk satu golongan atau kelompok.

Berangkat dari pemahaman pentingnya nilai-nilai Pancasila, dengan sejarah kelahiran dan aktor-aktor yang melahirkan Pancasila tersebut, maka pembahasan UUD 1945 menjadi bagian yang urgen berikutnya. Terlebih pada muatan pembukaan UUD 1945 yang memiliki spirit khazanah keindonesiaan yang melekat sesuai dengan kultur bersama. Para pengkaji tentang UUD ini telah mendapatkan perhatian penuh bagi para pengkaji tentang ke-Indonesiaan.

Eksistensi pembahasan berikutnya posisi keanekaragaman yang dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia dengan diskursus *bhineka tunggal ika*. Istilah dan konsepsi yang digunakan merupakan fakta yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan berbagai latarbelakang kesukuan, keanekaragaman budaya (kultur) dan juga banyak ragamnya kepercayaan dan keagamaan yang dimiliki. Kekhasan fakta ini tentu menjadi bagian yang diakomodir menjadi sebuah kesatuan dan diperdapati dalam semangat Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945.

Indahnya keanekaragaman yang memiliki spirit berbeda-beda tapi satu yakni untuk membawa Indonesia dengan segala tumpah darah dalam perjalanan historisnya, ternyata ada saja bertindak atau berperilaku untuk membuat kekacauan atau rasis terhadap antar suku, golongan atau ras. Terbukti dengan berbagai kasus yang sudah terjadi. Terlepas para pelaku sadar atau tidak dengan tindakannya rasis, tentu perilaku demikian tidak dapat ditolerir untuk merawat keromantisan fakta keanekaragaman di Indonesia. Oleh karenanya, berbagai tindakan preventif program pencerdasan untuk segenap bangsa dan Negara harus terus disosialisasikan demi satu kepentingan Indonesia.

Terlepas dari isu *bhineka tunggal ika* yang menjadi spirit berbangsa dan bernegara, yang harus benar-benar dirawat dan ditumbuhkan bagi semua generasi. Inilah kemudian menghantarkan pada pembeahasan berikutnya yang tidak kalah penting yakni NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebuah bangunan negara hasil dari perjuangan para pendahulu dengan berbagai jasa-jasanya untuk membentuk sebuah negara. Secara wilayah yang ditakdirkan

terbentang dikhatulistiwa dan memiliki iklim tropis yang diidentik negara kepulauan. Ungkapan yang kerap disebutkan wilayah Indonesia dari barat yakni Sabang sedangkan dari timur Merauke. Dua wilayah ini menjadi ingatan kuat bagi generasi, karena ketika di bangku sekolah dasar kerap dinyanyikan hasil gubahan R. Soeharjo yang berjudul “Dari Sabang Sampai Merauke”.⁸

Ragam dinamika kenegaraan yang dirasakan hingga sudah 78 tahun merdeka. Ini menunjukkan pemikiran tentang wajah NKRI terus dinamis dan ditelaah untuk menuju kesempurnaan. Terlepas dari pro dan kontra atau bahkan yang menginginkan sebuah wajah NKRI dengan sistem yang dipilih hingga mengakibatkan pemberontakan seperti yang terjadi pada PRRI. Bahkan memasuki abad XXI gerakan politik nasional terjadi dalam menumbangkan rezim orde baru (Orba) yang telah menguasai pemerintahan hingga 32 tahun.⁹ Gelombang pada tahun 1998 untuk merubah sebuah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan melahirkan beberapa kebijakan fundamental seperti Otonomi Daerah (Otda) dan kebebasan berpendapat. Dalam sistem NKRI seperti kajian konseptual yang dilahirkan para ahli memberikan catatan signifikan untuk memastikan kedaulatan Indonesia. Oleh karenanya, kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu atau diambil oleh siapapun. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Bahkan sebagai masyarakat, manakala isu sentral terhadap pengambilan wilayah, seluruh mata masyarakat tertuju pada kasus tersebut. Terlepas benar atau tidaknya, yang jelas masyarakat turut memberikan atensi dan perhatian sebagai dukungan terhadap pemerintah agar wilayah Indonesia dijaga dari oleh siapapun yang akan mengklaim sebagai wilayahnya. Seperti yang terjadi di Pulau Hambalat.

Dari narasi yang sudah diuraikan panjang di atas, kerangka penyusunan buku ini penting diperjelas. Yang dimulai dari mengungkapkan sejarah perjuangan bangsa, pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Karena ini ditargetkan untuk bahan referensi bagi guru tingkat sekolah dasar (SD) maka diperlukan satu pembahasan lagi yakni tentang pendidikan dan pembelajaran. berawal dari asumsi bahwa wacana pendidikan dan pembelajaran kerap tidak dipahami sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai terhadap peserta didik. Hingga terjadi *miss* prioritas atau superioritas terhadap praktik pembelajaran. Bahkan wacana update terhadap pengelolaan pendidikan dan pembelajaran dalam arti praktiknya kerap ditemukan tidak mengikuti pengkajian yang terbaru. Hingga pembelajaran lebih dirasakan pada “semaunya seorang guru”. Padahal,

⁸ Baca selanjutnya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7199025/lirik-dari-sabang-sampai-merauke-beserta-asal-usul-lagunya>

⁹ Orde baru dimulai dari naiknya Presiden Soeharto,

era *quantum* dalam pendidikan oleh para pengkaji telah menemukan dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia. Termasuk pada peranan penting otak manusia yang terus dikaji. Seperti munculnya pembelajaran berbasis otak dan tentu penemuan kecerdasan yang terus bergerak yang diawali dengan IQ (*intelligences Quotions*), EQ (*Emotional Qoutions*), SQ (*Spritual Qoutions*), dan kompleksitas kecerdasan yang dirampungkan oleh Howard Gardner dengan konsepsi MI (*Multiple Intellegences*).

Khazanah konseptual yang dikaji oleh para ahli, tentu menjadi sebuah keharusan untuk menjadi basis menciptakan sebuah pembelajaran di kelas-kelas. Inilah kemudian, menjadi dasar kajian untuk membedakan dengan praktik pembelajaran yang terdahulu dengan kekinian yang serba penemuan baru untuk dijadikan sebagai loncatan jauh prestasi peserta didik. Akan tetapi, lagi-lagi pembelajaran dilakukan tidak semudah kajian yang dilakukan oleh para ahli, melainkan menemukan problem-problem yang tidak serta merta pada pembahasan pembelajaran. Melainkan mental seorang guru dihadapkan pada posisi ketakutan dalam PBM dengan banyaknya tindakan hukum yang memasuki dunia pembelajaran. Seperti guru dipenjara akibat pendisiplinan siswa dan seterusnya. Manakala ketakutan yang dirasakan oleh guru di lapangan, tentu akan berdambak luas terhadap penguasaan siswa dalam PBM, dengan pengertian bahwa pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Para kritikus tentu memiliki harapan dan isu terhadap pembelajaran yang dianggap malpraktik pembelajaran, bahwa persoalan pembelajaran seorang guru tidak boleh bertindak kekerasan. Hingga guru menjadi serba salah. Satu sisi spirit transfer pengetahuan dan nilai kepada peserta didik. Akan tetapi ketakutan pada malpraktik pembelajaran yang berujung pada jeruji besi (penjara) menjadi sisi lain. Apakah polemik mental ini akan terus dirawat? Atau ada solusi kebijakan dari pemerintah pusat untuk melihat kultur pendidikan nasional? Yang jelas, pendidikan dan pengajaran harus terus dilakukan demi keberlangsungan generasi yang unggul Indonesia. Sesuai target nasional menciptakan generasi emas dalam menyambut satu abad kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.

Urgensitas pembahasan pendidikan dan pembelajaran ini dielaborasi dengan muatan materi mapel Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), memiliki harapan besar untuk tercapai tujuan pembelajaran sesuai yang diamanahkan dalam kurikulum. Idealnya tujuan yang digariskan untuk mapel tersebut, tentu tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Tentu ini didasari oleh berbagai faktor, dengan asumsi sebagai berikut. Pertama, bahwa pembelajaran yang dicanangkan oleh guru dalam PPKN atau Pkn tersebut tidak memberikan inspirasi bagi peserta didik. Hingga

tidak memberikan kesan untuk mengetahui dan berperilaku sesuai semangat tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, desain pembelajaran yang disertai dengan mengetahui potensi peserta didik menjadi sebuah keharusan bagi guru dalam hal ini guru kelas. Karena sejatinya yang mengajarkan PPKN atau PKn tersebut adalah bagian dari tanggung jawab guru kelas. Kedua, materi yang abstraksi dengan muatan moralitas seperti pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika harus dapat dikontekstualisasikan oleh guru dengan kondisi peserta didik sesuai kearifan local. Mendesain materi yang abstrak menjadi konkrit atau kontekstual tentu dapat menjadi bagian untuk dapat diidolakan oleh peserta didik dalam mempelajari sebuah materi. Atau dengan kerangka konseptualisasi Ambak (Apa manfaat bagiku) hasil dari pengembangan pembelajaran berbasis otak akan ditemukan. Dua asumsi ini paling tidaknya mewakili untuk melihat pentingnya dalam mendesain sebuah pembelajaran khususnya dibidang mapel yang sedang dibahas.

Karenanya, banyak yang terjebak pada *an sich* dan tekstual yang dalam pendidikan pancasila yang dianggap abstrak yang pada akhirnya absurditas ditemukan. Maka pembahasan di dalam buku ini, pembahasan tentang pendidikan dan pembelajaran diharapkan menjadi puncak materi pembahasan. Di satu sisi mengingatkan seorang guru atau calon guru untuk menguasai materi yang sesuai dengan rancangan pemerintah pusat (Kemendikbud), juga mampu mengelaborasi secara kontekstual materi tersebut dalam pembelajaran, menjadi di sisi lain. *Ultimate goal* nya adalah tercapainya tujuan mapel pada peserta didik. Baik tataran kognitif, afektif juga psikomotoriknya.

B. Sistematika Penulisan

Penulisan buku ini sesuai dengan tujuan penulisan dan sasaran di matakuliah PKN Materi MI/SD di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Prodi PGMI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU), sebagai matakuliah wajib tentang ke-PGMI-an. Akan tetapi, dengan dasar perubahan dan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), diperdapat sebuah terobosan baru atau perubahan tentang melihat kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, dimulai dari Tingkat TK hingga SMA sederajat. Secara otomatis kesadaran matakuliah yang ada di Prodi harus menyesuaikan dengan perubahan atau bahasa lain dari adaptif.

Narasi demikian berpengaruh terhadap pengelolaan pembelajaran dalam arti teknis yang berada di ruang kuliah, khususnya pada tingkat MI/SD. Karena Prodi memberikan perkuliahan harus disesuaikan dengan profil lulusan yang

dituju. Seperti PGMI yang dipersiapkan lulusannya menjadi guru Kelas di tingkat MI/SD. Maka, perkembangan apapun yang terjadi dilapisan kebijakan, seorang calon guru harus dipersiapkan dengan segala kompetensi yang harus mereka miliki. Seperti terjadinya perubahan nomenklatur nama mata pelajaran dari PKN menjadi Pendidikan Pancasila pada kurikulum Merdeka.

Urgensi mengikuti perubahan kebijakan atau adaptif, kesempatan buku ini tentu mengikuti konsepsi yang dibangun pemerintah tersebut. Maka pertanyaan yang mendasar adalah apa saja materi yang dibahas pada tingkat MI/SD? Pertanyaan ini tentu mendorong pada sebuah fakta konsepsi yang dikembangkan oleh pemerintah itu sendiri, dengan munculnya istilah Capaian Pembelajaran (CP) pada setiap jenjang materi atau jenjang fase.

Istilah CP dapat dikonfirmasi pada kebijakan kurikulum sebelumnya ditemukan istilah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI/KD) pada Kurikulum tahun 2013 (K-13) atau istilah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD) pada kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) pada tahun 2006. Tentu perubahan tersebut memiliki landasan pemikiran yang dibangun masing-masing. Tapi, pada kesempatan ini penulis akan menahan diri untuk tidak membahas tersebut. Karena, ada muatan matakuliah yang lain yang lebih spesifik menguraikan dan menjelaskan yakni matakuliah Pengembangan Kurikulum. Hanya saja, momentum ini penulis lebih memfokuskan untuk menunjukkan isi materi yang dibahas dengan belandaskan pada CP pada matapelajaran Pendidikan Pancasila.

**Tabel 1: Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila
untuk Tingkat MI/SD**

Fase	Kelas	Capaian Pembelajaran
A	1	☐ Pancasila: memiliki CP “Peserta didik mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga; mengenal para perumus Pancasila.” ☐ UUD 1945: Peserta didik mengenal aturan di lingkungan keluarga; menceritakan contoh sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga; dan menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga. ☐ Bhineka Tunggal Ika: Peserta didik mengidentifikasi dan menghargai identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan rumah dan sekolah.
	2	

		☐ NKRI: Peserta didik mengenal karakteristik lingkungan tempat tinggal dan sekolah, sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempraktikkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan tempat tinggal dan sekolah; menceritakan bentuk kerja sama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal dan sekolah.
B	3	☐ Pancasila: Peserta didik menunjukkan makna sila-sila Pancasila, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari; mengenal karakter para perumus Pancasila; menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. ☐ UUD 1945: Peserta didik mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal; mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah.
	4	
		☐ Bhineka Tunggal Ika: Peserta didik membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. ☐ NKRI: Peserta didik mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal (RT, RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan) sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; menunjukkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal dan sekolah.
B	5	☐ Pancasila: Peserta didik memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila; meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkan di lingkungan masyarakat; menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan Negara. ☐ UUD 1945: Peserta didik menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara; mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari; melaksanakan praktik musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama, serta menerapkannya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. ☐ Bhineka Tunggal Ika: Peserta didik menyajikan hasil identifikasi sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. ☐ NKRI: Peserta didik mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten/kota, provinsi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; menunjukkan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan sekitar sebagai wujud bela negara.
	6	

Tabel 1 di atas jelas terlihat terhadap CP yang akan dicapai dalam setiap kelas sesuai dengan fase peserta didik. Akan tetapi, agar tidak terjadi ambivalensi terhadap pembaca. Penulis akan menjelaskan konsepsi istilah fase yang diperdapati pada kolom tersebut. Istilah fase dalam semangat kurikulum Merdeka memiliki artikulasi pada tingkat level tertentu dimana peserta didik berada. Tampaknya pemikiran yang dapat dielaborasi munculnya fase ini adalah pendapatnya John Piaget tokoh pemikir yang mengungkapkan pada pertumbuhan dan perkembangan manusia khususnya anak-anak ada dua tingkatan yaitu operasional konkrit dan operasional abstrak. Penjelasan fase ini hanya menjelaskan sekilas saja, karena diperdapati istilah tersebut pada kurikulum terbaru. Yang perlu ditegaskan di sini adalah kepentingan penulisan buku ini lebih pada konsepsi materi yang ditemukan dalam CP.

Jika diperhatikan tabel tersebut fokus pada CP, maka diperdapati empat kerangka yang dipelajari terkait dengan Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu pembahasan pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pembahasan inilah kemudian menjadi wacana diskusi yang akan dibahas satu demi satu dengan pendekatan kontekstual-diskursif. Pilihan ini tentu tepat, dengan fakta yang terus menggelinding di wajah Indonesia, kerap dihantui bahwa hanya golongan tertentu yang dapat memahami atau terjadi klaim sepihak dengan menggunakan bahasa “kami sudah Pancasila, kami sudah taat UUD, kami romantis dengan keanekaragaman, dan NKRI harga mati”. Setelah membahas keempat konsepsi tersebut, maka penulis melanjutkan dengan isu dan gagasan terhadap pendidikan dan pembelajaran tingkat di MI/SD. Ini penting, mengingat tidak sedikit yang gagal memaknai terhadap konsepsi dan aktivitas pendidikan dan pembelajaran itu. Dimulai dari semangat filosofisnya, metodologisnya, dan isu-isu yang berkembang dalam dunia pendidikan, termasuk antusiasme masyarakat dibuktikan dengan perhatian secara serius dan kritis.

Penulis menarasikannya secara kritis melalui fakta-fakta yang berserakan secara umum terhadap pemahaman dan pengalaman masyarakat. Maka, inilah membuka nalar bahwa berbicara tentang Indonesia dan Pembelajaran bukanlah diperuntukkan bagi mereka yang berbicara konseptual saja, melainkan mereka yang hidup di Indonesia dan merasakan bagian dari prosesi berbangsa dan Negara.

Akan tetapi, penulis juga tidak menghindari teori dan konseptual yang dipahami di atas kerja akademik seperti memaknai Pancasila dan teori-teori pendidikan dan pembelajaran. Melainkan narasi penuh dialogis interaksionis

terhadap berbagai tema yang dibahas. Diyakini bahwa, strategi dalam sebuah narasi yang diperdapati yang ditulis oleh siapapun berangkat dari pendekatan, metode, dan sumber rujukan yang dipakai. Oleh karenanya, sejauh apapun seorang akademisi dalam mengungkapkan dan penjelasan tentang sesuatu, maka perlu diketengahkan adalah kesadaran terhadap apa yang diinginkan dari narasi yang dikerjakannya. Lagi-lagi, inilah membuka ruang diskusi bahwa konten yang diungkapkan seseorang dalam karya-karyanya bukanlah berisikan doktrin atau dogma seperti ajaran agama. Melainkan ruang diskusi nalar yang harus dikritisi. Terlebih pada urusan tema pendidikan Pancasila yang terlalu mengabaikan kondisi real masyarakat kekinian, yang bertarung pada muatan kepentingan politik golongan tertentu. Hingga berefek pada dunia pendidikan dan pembelajaran yang mengungkapkan bahwa semangat dari muatan pendidikan Pancasila diperdapati abstraksi yang tidak membumi pada persoalan bangsa dan Negara. Atau penjelasan yang pernah dilontarkan salah satu dosen PPKN materi di MI/SD, Arafat Lubis yang mengungkapkan bahwa mapel PKN MI/SD ini tidak menjadi idola bagi siswa-siswi bahkan boleh jadi tidak disukai.

Sekalipun saudara Arafat Lubis tersebut tidak mengungkapkan dengan data riset, akan tetapi itu menjadi pintu masuk untuk berasumsi berikutnya bahwa materi PKN dan Pembelajarannya perlu dikritisi. Boleh jadi, penjelasannya bagian dari aotu kritik internal sebagai dosen dan guru yang tidak mampu mengelaborasi pembelajaran itu secara kreatif, hingga muatan materinya melangit tanpa menyentuh kehidupan siswa sesuai kondisi kultur masing-masing.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia harus dipandang sebagai sumber inspirasi yang terus berkembang, bukan sebagai sesuatu yang statis dan terjebak dalam narasi heroik semata.

Memaknai ulang sejarah juga berarti mengakui keberagaman bangsa Indonesia dan mewariskan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan kepada generasi mendatang. Hanya dengan cara ini, perjuangan bangsa Indonesia yang telah lama berlangsung akan terus relevan dan memberi makna bagi pembangunan Indonesia di masa depan.

Daftar Bacaan

- Abdurachman, Paramita R. *Bunga Angin Portugis di Nusantara*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
- Amal, M. Adnan. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Malulw Urara 1250-1950*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Bullbeck, David. *et.al., Southeast Asian Export Since the 14th Century: Cloves, pepper, Coffee, and Sugar*
- Burnet, Ian. *Spice Islands*, Kenthurst NSW: Rosenberg Publishing, 2011.
- Cribb, Robert & Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia* (Lanham, Scarecrow Press, 2004).
- de Argensola, Bartholomew Leonardo. *The Discovery and Conquest of the Molucco and Philippines Islands*, London, 1708.
- Enenkel, Karl E. (Editor), *The Dutch Trading Companies as Knowledge Networks* Leiden: Brill, 2010.
- Hanna, Willard. *Kepulauan Banda: Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala* Jakarta: Gramedia, 1983.
- Jacobs, Els M. *Merchant in Asia: The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century*, Leiden: CNWS Publications, 2006.
- Keuning, J. *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad Ke-17*, Jakarta: Bhratara, 1973.
- Lape, Peter Vanderford. *Contact and Conflict in the Banda Islands, Eastern Indonesia Centuries*, Brown University: Disenasi yang tidak dipublikasikan, 2000.

- Lapian, "Beberapa jalan dagang ke Maluku Sebelum A bad ke limabelas dalam *Madjalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, 1, 3, 1965.
- Leirissa, Richard Z. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Leirissa, Richard Z. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia* (Jakarta: Lembaga Sejarah FSUI, 1975.
- Makfi, Samsudar. *Masa Penjajahan Kolonial*, Singkawang: Maraga Borneo Tarigas, 2019.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*, The Hague, 1962.
- Pires, Tome. *Suma Oriental: Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (Eds), *Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-1900)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Ravindran, P.N. "Introduction", dalam P.N. Ravindran (editor), *Black Pepper: Piper Nigrum*, Amsterdam:
- Reid, Anthony. *Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara, 1450-1680*, Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Modern Indonesia 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2008.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah Pesantren Madrasah dan Sekolah dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Thomas, Lijo & Rajcev P., *Black Pepper*, Kerala: Indian Institute of Spices Research, 2015.
- Turner, Jack. *Sejarah Rempah: Dari Erotisme sampai Imperialisme* (Penerjemah Julia Absari), Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Zanden, J.L. van. *The Rise and Decline of Holland's Economy: Merchant Capitalism and the Labor Market*